

LAPORKAN LKPD UNAUDITED 2024, BUPATI KONSEL KOMITMEN KELOLA KEUANGAN DENGAN TRANSPARAN



Sumber gambar:

<https://elindonews.id/wp-content/uploads/2025/03/80a0a314-93f4-41c8-b4d9-8be070087664.jpeg>

Isi Berita:

KENDARI, Elindonews.id – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (27/3/2025). Penyerahan LKPD ini diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima oleh Bupati Irham Kalenggo, yang disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., M.I.T., Ak., CFE., CA., CSFA., CFRA. Selain itu, hadir pula Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangeruka, serta beberapa kepala daerah lainnya yang turut menyerahkan LKPD, di antaranya perwakilan dari Kota Kendari, Baubau, Konawe, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam penyampaian LKPD secara tepat waktu. Ia berharap seluruh daerah di Sultra, termasuk 11 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan sebelumnya, dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dadek juga menegaskan bahwa meskipun kepala daerah memiliki masa jabatan terbatas, tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah tetap melekat dan harus dipertanggungjawabkan sesuai aspek formal maupun materiil.

“Pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh tiga pilar utama, yakni Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jika ketiganya

berkolaborasi dengan baik, maka sistem pemerintahan akan berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangeruka, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam penyerahan LKPD ini merupakan bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, meskipun dirinya baru bertugas selama 27 hari.

“Di tengah berbagai tantangan, termasuk kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi, kami tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan bimbingan dari BPK,” ungkapnya. Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa penyampaian LKPD ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 3, yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Pemeriksaan pendahuluan telah berjalan lancar, dan hari ini kami menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini merupakan wujud komitmen Pemda Konsel dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya. Irham Kalenggo juga mengakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPK guna memastikan penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku.

Di akhir pernyataannya, Irham Kalenggo menyampaikan apresiasi kepada BPK atas bimbingan yang diberikan serta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan LKPD tepat waktu. “Kami akan terus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah dengan harapan dapat memperoleh opini terbaik dari BPK,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://elindonews.id/2025/03/laporkan-lkpd-unaudited-2024-bupati-konsel-komitmen-kelola-keuangan-dengan-transparan/>, “Laporkan LKPD Unaudited 2024, Bupati Konsel Komitmen Kelola Keuangan dengan Transparan”, tanggal 28 Maret 2025.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/04/08/komitmen-wujudkan-transparansi-tata-kelola-keuangan/>, “Komitmen Wujudkan Transparansi Tata Kelola Keuangan”, tanggal 8 April 2025.

Catatan:

- Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 1. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 2. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
 3. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 4. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjaaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; dan

6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
1. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 2. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
 3. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
 4. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 6. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK), pada:
1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK;
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat;
 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima; dan

5. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.